PEMBUKTIAN TERHADAP UNSUR KERUGIAN KEUANGAN NEGARA PADA KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI

Oleh :*Ilhamdi Arfan*

Pembimbing I :*Dr. Erdianto, SH.,M.Hum.*

Pembimbing II :*Ledy Diana, SH., M.H*

Alamat: *Perumahan Paradise D.15 Rimbo Panjang, Kampar- Riau*

Email: *ilhamdiarfan05@gmail.com*

ABSTRACT

National Development aims to realize the Indonesian people as a whole and the Indonesian community as a whole that is just, prosperous, and orderly based on Pancasila and the 1945 Constitution. To realize the just, prosperous and prosperous Indonesian society, its necessary to continually improve the efforts prevention and eradication of criminal acts on general and criminal acts of corruption in particular. Amid the national development efforts in various fields, the aspirations of the people to eradicate corruption and other forms of irregularities are increasing, because in the reality of corrupt deeds have caused huge losses of the state which in turn can have an impact on the emergence of crises in various fields. The purpose of this thesis is to know how to prove the element of state financial losses in cases of corruption and what is the basis of consideration in determining the state financial losses in cases of corruption.

This research is a normative research or literature research, which is the type of research conducted by examining secondary legal materials or research based on book rules that have been recorded, also called library research. In this case the writer focus on research on the principle of law, by tracing the various regulations that have to do with the proof of the element of state financial losses in cases of corruption.

From the results of the research that the writer do can be concluded, the first proof of the element of state financial losses has been started since the investigation where the investigator asked the expert to conduct an investigative audit and produce investigative audit results, the results are used in the trial contained in the indictment, although the investigative audit carried out independently and objectively the judge did not have to follow the amount of financial loss of the state calculated by the expert. The judge determines the amount of financial loss of the state based on the facts revealed in assembly, this is in accordance with the duties of the judge who are obliged to maintain the independence of the judiciary, but the difference in the calculation of state losses affects the return of the state financial losses that are not maximal due to corruption. The second basic considerations in calculating the state financial losses made by experts based on investigative audit while judge based on facts revealed in the trial. The difference in the calculation of state financial losses caused by the different methods of calculating state financial losses, although the source of financial loss is the same.

Keywords: *Proof - Finance - Country – Corruption*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang merugikan keuangan negara yang menimbulkan proses pembangunan menjadi mundur dalam kehidupan masyarakat, selain itu dapat juga mengakibatkan perubahan kondisi sosial masyarakat yang memiliki dampak sosial negatif. Jika dilihat dari pengertian korupsi menurut Undang-Undang yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).

Penjelasan Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa. “Dalam ketentuan ini kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi, cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat”. Dengan dirumuskannya tindak pidana korupsi seperti yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) sebagai delik formil, maka adanya kerugian keuangan negara atau kerugian perekonomian keuangan negara tidak harus sudah terjadi, karena yang dimaksud dengan delik formil adalah delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang. Dengan demikian, agar seseorang dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi seperti yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1), tidak perlu adanya alat-alat bukti untuk membuktikan bahwa memang telah terjadi kerugian keuangan negara atau perekonomian negara.

Akan tetapi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 24 Juli 2006 Nomor 003/PUU-IV/2006 yang dalam pertimbangan

hukumnya menyebutkan adanya penjelasan yang menyatakan bahwa kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan negara”, kemudian mengklasifikasikannya sebagai delik formil, sehingga adanya kerugian negara atau perekonomian negara tidak merupakan akibat yang harus nyata terjadi. Mahkamah berpendapat bahwa hal demikian ditafsirkan bahwa unsur kerugian keuangan negara harus dibuktikan dan harus dihitung, meskipun sebagai pikiran atau meskipun belum terjadi. Kesimpulan demikian harus ditentukan oleh seorang ahli di bidangnya. Faktor kerugian, baik secara atau berupa kemungkinan, dilihat sebagai hal yang memberatkan atau meringankan dalam penjatuhan pidana, sebagaimana diuraikan dalam penjelasan Pasal 4, bahwa pengembalian kerugian negara hanya dapat dipandang sebagai faktor yang meringankan. Oleh karenanya persoalan kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, lebih merupakan persoalan pelaksanaan dalam praktek oleh aparat penegak hukum, dan bukan menyangkut konstitusional norma. Dari pertimbangan hukum dalam putusan Mahkamah Konstitusi di atas, dapat pula diketahui bahwa untuk dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi seperti yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1), keuangan negara atau perekonomian negara tidak perlu benar-benar menderita kerugian.¹

Pengertian keuangan negara memberikan suatu determinasi terhadap unsur-unsur untuk terpenuhinya kriteria kerugian keuangan negara sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, yaitu:² 1) Berkurangnya keuangan negara, 2) Bersifat nyata dan pasti

¹ R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Rinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 31.

² M. Adi Toegarisman, *Pemberantasan korupsi Dalam Paradigma Efisiensi*, Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2016, hlm. 33.

jumlahnya, 3) Sebagai akibat perbuatan melawan hukum. Kriteria yang menyatakan bahwa kerugian keuangan negara harus memenuhi “keharusan yang nyata dan pasti dari sifat kerugian negara”, maka dalam menetapkan kerugian negara, perhitungan harus dibuat atas dasar ketiga kriteria kerugian negara sebagaimana yang dinyatakan di atas.³

Ketidakpastian dalam menghitung kerugian keuangan negara pada kasus tindak pidana korupsi dapat dilihat dalam Putusan Nomor 64/Pid.Sus-Tpk/2015/PN.Pbr dengan terdakwa Hartono SE, dalam putusannya ada perbedaan pendapat mengenai penghitungan kerugian keuangan negara, antara hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh ahli dengan pertimbangan hukum hakim, ahli yang dihadirkan di persidangan berpendapat bahwa kerugian keuangan negara sebesar Rp.1.712.156.000 (satu milyar tujuh ratus dua belas juta seratus lima puluh enam ribu rupiah) sedangkan dalam pertimbangan hukum hakim menyatakan bahwa kerugian keuangan negara sebesar Rp.375.086.000 (tiga ratus tujuh puluh lima juta delapan puluh enam ribu rupiah) dan Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg dengan terdakwa M. Yaeni SH bin H.Sukiman. Dalam pertimbangan hukum hakim ada perbedaan penghitungan kerugian keuangan negara yang terjadi akibat dipergunakan untuk kepentingan pribadi. Dalam pertimbangan hukum hakim disebutkan sebagai berikut : Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dari kerugian negara yang terjadi akibat dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2008 adalah sebesar Rp.611.171.574.

Sedangkan dalam satu pertimbangan hukum hakim pada bagian lain disebutkan, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara bertahap dan dalam waktu antara kurun waktu tahun 2006 sampai 2008 sehingga jumlah pengeluaran untuk kepentingan pribadi terdakwa tahun 2006 sampai 2008 sebesar Rp.270.870.117.

³ Ibid

Perbedaan penghitungan kerugian keuangan negara sebagaimana dalam Putusan Nomor 64/Pid.Sus-Tpk/2015/PN.Pbr dan Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg telah menimbulkan ketidakpastian hukum.

Dari kedua putusan tersebut adanya perbedaan penghitungan kerugian keuangan negara. Oleh karena itu dari berbagai aspek dalam uraian latar belakang masalah di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan akan memfokuskan pembahasan masalah dengan judul: **“Pembuktian Terhadap Unsur Kerugian Keuangan Negara Pada Kasus Tindak Pidana Korupsi”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah cara pembuktian terhadap unsur kerugian keuangan negara pada kasus tindak pidana korupsi?
2. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan dalam menentukan unsur kerugian keuangan negara pada kasus tindak pidana korupsi?

C. Tujuan Penulisan dan Kegunaan Penulisan

1. Tujuan Penulisan

- a. Untuk mengetahui cara pembuktian terhadap unsur kerugian keuangan negara pada tindak pidana korupsi.
- b. Untuk mengetahui dasar pertimbangan dalam menentukan unsur kerugian keuangan negara pada kasus tindak pidana korupsi.

2. Kegunaan Penulisan

- a. Sebagai salah satu persyaratan guna memperoleh sarjana hukum (S.H) pada Fakultas Hukum Universitas Riau.
- b. Sebagai bahan rujukan dan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya khususnya dalam penelitian yang sama.
- c. Memberikan sumbangsih pemikiran kepada lembaga yang terkait dengan pemberantasan tindak pidana korupsi.

D. Kerangka Teori

1. Teori Tindak Pidana

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang dapat bertanggungjawab yang mana perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan atau diperbolehkan oleh Undang-Undang yang diberi sanksi berupa

sanksi pidana.⁴ Perbuatan tindak pidana tidak sama dengan perbuatan biasa, perbuatan pidana ini disebut dengan “*delik*”, yaitu suatu perbuatan yang diatur oleh Undang-Undang bahwa perbuatan tersebut dilarang oleh Undang-Undang.⁵ Apabila perbuatan itu dilanggar maka akan dikenakan hukuman atau pidana oleh karena itu, perbedaan tindak pidana dengan perbuatan biasa adalah dari segi dasarnya, perbuatan pidana diatur oleh Undang-Undang sementara perbuatan biasa tidak diatur oleh Undang-Undang.⁶

Tindak pidana korupsi disebut juga suatu perbuatan memperkaya diri sendiri atau suatu golongan merupakan tindakan yang sangat merugikan orang lain, bangsa, dan negara. Adapun unsur-unsur tindak pidana korupsi bisa dilihat pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyatakan bahwa pelaku tindak pidana korupsi adalah “setiap orang yang melawan hukum yang melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah)”.⁷

2. Teori Pembuktian

Pembuktian adalah perbuatan membuktikan. Membuktikan berarti memberi atau memperlihatkan bukti, melakukan sesuatu sebagai kebenaran,

melaksanakan, menandakan, menyelesaikan dan meyakinkan.⁸

Pembuktian tentang benar tidaknya dan terbukti atau tidak terbuktinya terdakwa melakukan perbuatan seperti termuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, bagian terpenting dalam proses acara pidana. Dalam proses ini hak asasi manusia menjadi hal yang sangat penting. Bagaimana akibatnya jika seseorang yang alat bukti yang ada disertai dengan keyakinan hakim, padahal tidak benar. Untuk inilah maka hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materiil.⁹

Dikaji dalam perspektif sistem peradilan pidana pada umumnya dan hukum acara pidana pada khususnya, aspek pembuktian memegang peranan menentukan untuk menyatakan kesalahan seseorang sehingga dijatuhkan pidana oleh hakim. Dalam konteks hukum pidana, pembuktian merupakan inti persidangan perkara pidana karena yang dicari dalam hukum pidana adalah kebenaran materiil. Kendatipun demikian, pembuktian dalam perkara pidana sudah dimulai sejak tahap penyelidikan untuk mencari dan menentukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan.¹⁰

3. Teori Pertanggungjawaban pidana

Dalam hukum pidana konsep *liability* atau pertanggungjawaban merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan ini dikenal dengan sebutan *mens rea*, suatu kejahatan tidak mengakibatkan orang bersalah kecuali pikiran orang itu jahat.¹¹ Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak

⁴ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 100.

⁵ Aswani Adam dan Zulkifli, *Prinsip-Prinsip Dasar Sistem Hukum Indonesia*, Alaf Riau, Pekanbaru, 2006, hlm. 103.

⁶ *Ibid.*

⁷ Chatriana Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianingsih, *Pendidikan Anti Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 5.

⁸ Soedirjo, *Jaksa dan Hakim dalam Proses Pidana*, Jakarta, CV akademika Pressindo, 1985, hlm. 47.

⁹ Wahyu Wiriadinata, “Korupsi dan Pembalikan Beban Pembuktian”, *Jurnal Konstitusi*, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Vol. 9, No. 2 Juni 2012, hlm. 320.

¹⁰ Eddy O.S Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Yogyakarta, PT Gelora Aksara Pratama, 2012, hlm. 7.

¹¹ <http://www.e-jurnal.com/2014/01/pertanggungjawaban-pejabat-administrasi.html>, diakses, tanggal, 13 Maret 2017.

pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang.¹²

Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana bukan hanya berarti sah menjatuhkan pidana terhadap orang itu, tetapi juga sepenuhnya dapat dipenuhi bahwa memang pada tempatnya meminta pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya.¹³ E .Y. Kanter dan S. R. Sianturi menjelaskan bahwa unsur mampu bertanggung jawab mencakup:¹⁴

1. keadaan jiwanya:
 - a. Tidak Terganggu oleh penyakit terus menerus atau sementara (*temporarior*);
 - b. Tidak cacat dalam pertumbuhan dan tidak terganggu karena terkejut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar, melindur, mengigau, dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain dalam keadaan sadar.
2. Kemampuan jiwanya:
 - a. Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya;
 - b. Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut apakah akan dilaksanakan atau tidak; dan
 - c. Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

E. Kerangka Konseptual

1. Pembuktian adalah suatu proses, cara, perbuatan membuktikan, usaha menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa dalam sidang pengadilan.¹⁵
2. Kerugian negara adalah kekurangan uang atau surat berharga dan barang yang nyata serta pasti jumlahnya sebagai akibat dan

perbuatan melawan hukum baik disengaja maupun karena kelalaian.¹⁶

3. Keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.¹⁷
4. Tindak pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan Undang-Undang atau peraturan-peraturan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.¹⁸
5. Korupsi adalah perbuatan yang buruk, seperti penggelapan uang, penerimaan suap, dan sebagainya untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara, yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kepentingan dan kekuasaan.¹⁹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Mengacu pada judul dan rumusan masalah, maka penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan, yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum sekunder atau penelitian berdasarkan aturan-aturan buku yang telah dibukukan, disebut juga dengan penelitian kepustakaan.²⁰ Dalam hal ini penulis menitikberatkan kepada penelitian terhadap asas hukum, dengan menelusuri berbagai peraturan yang ada kaitannya dengan pembuktian terhadap unsur kerugian keuangan negara pada kasus tindak pidana korupsi.

¹² Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 70-71.

¹³ *Ibid*, hlm. 65-66.

¹⁴ E. Y. Kanter & S. R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 249.

¹⁵ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Balai pustaka, Edisi Ketiga, cetakan keempat, 2005, hlm. 172.

¹⁶ Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.

¹⁷ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

¹⁸ Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm. 24.

¹⁹ Chartrina Darul Rosikah dan Dessy Marlioni Listianingsih, *Op Cit*, hlm. 3.

²⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT.Raja Grafindo Perseda, Jakarta, 2004, hlm. 13-14.

2. Sumber Data

Sumber data yang dilakukan dalam penelitian ini, penelitian hukum normatif berupa data sekunder. Data sekunder yang dimaksud dalam penelitian ini terbagi menjadi 3 (tiga) bahan hukum, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 5) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer seperti karya tulis bidang hukum, rancangan undang-undang dan sejenisnya.²¹

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan-bahan yang menunjang atau memberi petunjuk baik bagi bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder seperti kamus.²²

3. Teknik Pengumpulan Bahan

Dalam pengumpulan data untuk penelitian hukum normatif digunakan metode kajian kepustakaan. Dalam hal ini seorang peneliti harus jeli dan tepat untuk menemukan data yang terdapat baik dalam peraturan-peraturan maupun dalam literatur-literatur yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang diteliti.

4. Analisis Data

Dalam penelitian hukum ini analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif yaitu data tidak dianalisis dengan menggunakan statistik ataupun yang

sejenisnya, namun cukup dengan menguraikan secara deskriptif dari data yang telah diperoleh.

Selanjutnya penulis menarik kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus, yang mana dalam mendapatkan suatu kesimpulan dimulai dengan melihat faktor-faktor nyata dan diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan yang juga merupakan fakta dimana kedua fakta tersebut dijumpai oleh teori-teori.²³

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Cara Pembuktian Terhadap Unsur Kerugian Keuangan Negara Pada Kasus Tindak Pidana Korupsi

Pembuktian terhadap unsur kerugian keuangan pada kasus tindak pidana korupsi menjadi permasalahan dalam putusan hakim khususnya Putusan Nomor 64/Pid.Sus-Tpk/2015/PN.Pbr dengan terdakwa Hartono SE. Serta Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg dengan terdakwa M. Yaeni SH bin H.Sukiman.

Putusan Nomor 64/Pid.Sus-Tpk/2015/PN.Pbr adanya perbedaan penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh ahli dengan pertimbangan hukum hakim. Dalam kasus ini terdakwa selaku Kepala Unit Galangan Kapal (UGK) mempunyai tugas dan wewenang untuk mengawasi dan memprogramkan target laba yang ditentukan oleh kantor pusat PT. Pelindo I (persero), dan kegiatan bisnis yang dilaksanakan oleh Unit Galangan Kapal (UGK) meliputi perbaikan dan perawatan kapal. Berawal pada saat Kapal Tuna Bayu II stop operasi karena *Crank sharp* Mesin Induk Kanan Patah, Terdakwa selaku Kepala UGK mengajukan uang muka tahap I sebesar 30% dari harga borongan, yaitu sebesar Rp. 1.712.156.000 yang mana harga borongannya sebesar Rp. 4.978.000.000. akan tetapi dalam Surat Perintah Kerja Nomor : UM.58/20/9/DUM-2010 mengenai pekerjaan *General Overhaul* mesin induk kanan KT.

²¹ Erdianto Effendi, *Pengetahuan Dasar dan Teknis Dalam Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2001, hlm. 21.

²² *Ibid.*

²³ Aslim Rasyad, *Metode Ilmiah, Persiapan Bagi Peneliti*, UNRI Press, Pekanbaru, 2005, hlm. 20

Bayu II terdapat klausul yang menyatakan bahwa, pembayaran Harga Borongan dilakukan secara sekaligus setelah fisik pekerjaan mencapai 100%.

Uang muka tersebut akan digunakan untuk modal kerja tahap ke 1, akan tetapi tipe mesin yang disediakan tidak sesuai dengan spesifikasi Mesin Induk Kanan KT. BAYU II, dimana tipe mesin yang disediakan NIIGATA 6 MG 28 BX 1300 HP Rpm 600 yang seharusnya adalah NIIGATA 6 L 28 BXE 1600 HP Rpm 720. PT. Citrapola Niaga Nusantara (PT.CNN) sebagai subkontrak belum dapat menyediakan mesin sesuai spesifikasi dalam perjanjian, namun terdakwa selaku kepala UGK tetap meminta dikeluarkannya uang muka sebanyak 30% dari total Rp. 4.265.000.000 yaitu sebesar Rp. 1.712.156.000. dan saksi Budi Setiadi mencairkan uang muka tahap I untuk pekerjaan *General Overhaul* (GO) Mesin Induk Kanan KT. BAYU II.

Akibat dari perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Ir. Zainul Bahri (dituntut secara terpisah) telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 1.712.156.000,- (satu milyar tujuh ratus dua belas juta seratus lima puluh enam rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Perbaikan Docking KT. Bayu II Pada PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Nomor : SR-356/D6/02/2015 tanggal 25 Mei 2015, dengan perincian sebagai berikut :²⁴

1)	Realisasi pembayaran oleh PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) kepada UGK PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) atas pekerjaan <i>General Overhaul</i> Mesin Induk Kanan KT. Bayu II (sesuai dengan bukti transfer)	Rp. 1.712.156.000,-
2)	Nilai Prestasi Atas Pekerjaan Pemasangan Mesin Induk Kanan	0

	KT Bayu II yang oleh UGK disubkontraktorkan kepada PT. Citrapola Niaga Nusantara (PT.CNN)	
	Jumlah kerugian keuangan negara Poin 1) dikurangi poin 2)	Rp. 1.712.156.000,-

Keterangan ahli Sri Lanniwati Susanto, SE, CfrA di dalam persidangan menyatakan bahwa hasil penghitungan kami berdasarkan total *loss* dari uang muka yang diberikan tidak ada penyelesaian kapal, tidak bisa berjalan, kerugian keuangan negara Rp. 1.712.156.000. Bahwa didalam kontrak dari kapal itu rusak sampai dilakukan *site trail* (difungsikan berlayar uji coba) namun sampai kontrak itu diputuskan kapal tidak dapat difungsikan.

Sedangkan dalam pertimbangan hukum hakim menyatakan bahwa kerugian keuangan negara yang tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa sebagai Kepala UGK adalah sebesar Rp. 375.086.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta delapan puluh enam ribu rupiah), angka ini didapatkan dari Rp. 1.712.156.000 dikurangi dengan Rp. 1.300.450.000 yang diberikan kepada PT. CNN dikurangi dengan Rp.411.706.000,- yang masih berada pada bendahara pengeluaran UGK dikurangi dengan Rp.14.000.000,- untuk pembayaran ITS dikurangi dengan Rp. 14.620.000,- dikurangi dengan Rp.12.000.000 untuk Pajak KT Bayu II, sehingga sisa jumlah uangnya adalah sebesar Rp. 375.086.000,- (Tiga ratus juta tujuh puluh lima juta delapan puluh enam ribu rupiah).

Dari uraian diatas tampak jelas bahwa ada perbedaan antara penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh ahli dengan pertimbangan hukum hakim. Ahli dalam persidangan menyatkan bahwa kerugian keuangan negara sebesar Rp. 1.712.156.000 angka ini didapatkan karena tidak ada nilai prestasi atas pekerjaan pemasangan mesin induk kanan KT. Bayu II yang oleh UGK disubkontraktorkan kepada PT. Citrapola Niaga Nusantara (PT.CNN), sedangkan pertimbangan

²⁴ Putusan Nomor : 64/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pbr. hlm. 21.

hukum hakim jumlah kerugian keuangan negara yang ditemukan ahli yaitu sebesar Rp. 1.712.156.000 dikurangi dengan jumlah uang yang telah dikeluarkan oleh terdakwa untuk perbaikan KT. Bayu II, sedangkan kapal yang diperbaiki tersebut hingga kontrak diputus, kapal tidak dapat difungsikan karena spesifikasi mesin yang diperbaiki tidak sesuai dengan yang diinginkan, dan dalam Surat Perintah Kerja Nomor : UM.58/20/9/DUM-2010 ada klausul yang menyatakan bahwa pembayaran harga borongan dilakukan secara sekaligus setelah fisik pekerjaan mencapai 100%. Sedangkan kapal yang diperbaiki belum mencapai 100% namun Terdakwa selaku Kepala UGK tetap meminta uang muka tahap I sebesar Rp. 1.712.156.000.

Perbedaan penghitungan kerugian keuangan negara selain terdapat dalam Putusan Nomor 64/Pid.Sus-Tpk/2015/PN.Pbr, juga terdapat dalam Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg dengan terdakwa M. Yaeni SH bin H.Sukiman. Dalam kasus ini terdakwa M. Yaeni Bin H. Sukiman selaku Ketua DPRD Kabupaten Grobongan, telah merugiakan keuangan negara. Laporan Hasil Audit Investigatif BPKP Perwakilan Jawa Tengah Nomor: LHAI/PWII/5/2009 tanggal 29 Desember 2009 sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit Investigatif atas dugaan Penyimpangan Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Sekretariat DPRD Kabupaten Grobongan Tahun 2006, 2007 dan 2008 telah merugiakan keuangan negara cq pemerintah daerah Kabupaten Grobongan sebesar Rp. 1.959.457.343,- (satu milyar sembilan ratus lima puluh sembilan juta empat ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut dengan perincian sebagai berikut :

Bahwa dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan terdakwa bersama-sama dengan Agus Suprianto, SH. bin Suyahmo, H. Soenarto, SH. MM. bin Setamun dan Drs. Sutanto, MM. bin Sumrto tersebut telah memperkaya diri terdakwa sendiri yaitu mendapatkan uang sebesar Rp.611.171.574,- (enam ratus sebelas juta seratus tujuh puluh

satu lima ratus tujuh puluh empat rupiah). Dengan perincian sebagai berikut :

- Tahun 2006 sebesar Rp. 213.769.808,-;
- Tahun 2007 sebesar Rp. 289.415.850,-;
- Tahun 2008 sebesar Rp. 107.985.916,-;

Dalam pertimbangan hukum hakim ada perbedaan penghitungan kerugian keuangan negara yang terjadi akibat dipergunakan untuk kepentingan pribadi. Dalam pertimbangan hukum hakim disebutkan sebagai berikut : Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dari kerugian negara yang terjadi akibat dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2008 adalah sebesar Rp.611.171.574. Sedangkan dalam satu pertimbangan hukum hakim pada bagian lain disebutkan, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara bertahap dan dalam waktu antara kurun waktu tahun 2006 sampai 2008 sehingga jumlah pengeluaran untuk kepentingan pribadi terdakwa tahun 2006 sampai 2008 sebesar Rp.270.870.117.

Pertimbangan hukum hakim yang menyebutkan bahwa kerugian keuangan negara yang terjadi akibat dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa sebesar Rp.611.171.574 tentunya mengikuti dari Laporan Audit Investigatif BPKP Perwakilan Jawa Tengah Nomor: LHAI/PWII/5/2009 tanggal 29 Desember 2009 dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, sedangkan pertimbangan hukum hakim pada bagian lain yang menyebutkan bahwa kerugian keuangan negara untuk kepentingan pribadi terdakwa sebesar Rp.270.870.117 tidak mengikuti dari Laporan Audit Investigatif BPKP Perwakilan Jawa Tengah Nomor: LHAI/PWII/5/2009 tanggal 29 Desember 2009.

Terdakwa M. Yaeni SH bin H.Sukiman dijatuhkan pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu sebesar Rp.

187.353.574, angka ini didapatkan kerana terdakwa telah mengembalikan uang yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa yang merupakan kerugian negara ke kas Daerah Kabupaten Grobongan sebesar Rp. 423.808.000. maka angka Rp. 187.353.574 diperoleh dari kerugian negara yang terjadi akibat dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2008 adalah sebesar Rp.611.171.574. Sebagaimana Audit Investigatif BPKP dikurangi dengan uang yang telah dikembalikan ke kas Daerah Grobongan yaitu sebesar Rp. 423.808.000 sehingga hasilnya Rp. 187.353.574 (seratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah).

Pembuktian terhadap unsur kerugian keuangan negara pada kasus tindak pidana korupsi apabila merujuk pada Putusan Nomor 64/Pid.Sus-Tpk/2015/PN.Pbr dan Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg sudah dimulai dari tingkat penyidikan, jeksa selaku penyidik meminta bantuan kepada ahli, dalam hal ini ahli dari BPKP. Yang bertugas untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan negara berdasarkan surat perintah yang dikeluarkan oleh penyidik.

Dalam Putusan Nomor 64/Pid.Sus-Tpk/2015/PN.Pbr dan Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg, ahli melakukan audit perhitungan kerugian keuangan negara/ Investigatif sebagaimana keterangan ahli dalam persidangan. Audit investigatif adalah proses mencari, menentukan dan mengumpulkan bukti secara sistematis yang bertujuan mengungkapkan terjadi atau tidak terjadi suatu perbuatan dan pelakunya guna dilakukan tindakan hukum selanjutnya.²⁵

Untuk melaksanakan audit investigatif ahli dari BPKP berpedoman kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada bagian Stndar Pelaksanaan Audit Investigatif yang mengatur tentang :

1. Perencanaan

Rencana audit investigatif dibuat untuk setiap penugasan audit infestigatif berdasarkan informasi yang diterima. Sumber informasi dapat berasal dari pengaduan masyarakat, pengembangan hasil audit kinerja maupun audit lainnya, permintaan instansi aparat penegak hukum serta permintaan instansi lainnya.

Dalam Putusan Nomor 64/Pid.Sus-Tpk/2015/PN.Pbr dan Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg sumber informasi yang diterima oleh auditor dari permintaan instansi penegak hukum yaitu kejaksaan.

a. Penetapan sasaran, ruang lingkup dan alokasi sumberdaya

1) Sasaran, sasaran audit investigatif adalah terungkapnya kasus penyimpangan yang berindikasi dapat menimbulkan terjadinya kerugian keuangan negara/daerah.

Dalam Putusan Nomor 64/Pid.Sus-Tpk/2015/PN.Pbr sasaran audit infestigatif adalah kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam perbaikan Docking KT Bayu II pada PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero), dan Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg sasaran audit infestigatif adalah dugaan penyimpangan kegiatan pemeliharaan kendaraan dinas sekretariat DPRD Kabupaten Grobongan Tahun anggaran 2006, 2007 dan 2008.

2) Ruang lingkup, ruang lingkup audit investigatif meliputi pengungkapan fakta dan proses kejadian, sebab dan dampak penyimpangan, dan penentuan pihak-pihak yang diduga terlibat dan atau bertanggungjawab atas penyimpangan.

Dalam Putusan Nomor 64/Pid.Sus-Tpk/2015/PN.Pbr pihak yang bertanggungjawab adalah Hartono selaku Kepala Unit Galangan Kapal, dan Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg pihak yang bertanggungjawab adalah

²⁵ Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/05/M.PAN/03/2008, *Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah*.

M. Yaeni, SH bin H. Sukiman selaku Ketua DPRD Kabupaten Grobongan priode tahun 2004 sampai dengan 2009.

- 3) Alokasi sumber daya, tujuan penerapan alokasi sumber daya pendukung audit investigatif adalah agar kualitas audit investigatif dapat dicapai secara optimal.

b. Pertimbangan dalam perencanaan

Dalam penyusunan rencana audit investigatif, auditor investigatif harus mempertimbangkan berbagai hal, antara lain :

- 1) Sasaran, ruang lingkup, dan alokasi sumber daya;
- 2) Pemahaman mengenai akuntabilitas berjenjang;
- 3) Aspek-aspek kegiatan operasi auditi dan aspek pengendalian intern;
- 4) Jadwal kerja dan batasan waktu;
- 5) Hasil audit priode atau priode-priode sebelumnya dengan mempertimbangkan tindak lanjut terhadap rekomendasi atas temuan sebelumnya;
- 6) Teknik-teknik pengumpulan bukti audit yang tepat;
- 7) Mekanisme koordinasi antara auditor, auditi, dan pihak terkait lainnya.

2. Supervisi

Dalam menyusun rencana audit investigatif, pekerjaan auditor harus disupegisi secara memadai untuk memastikan tercapainya sasaran, terjaminnya kualitas, dan meningkatnya kemampuan auditor.

3. Pengumpulan dan pengujian bukti

Auditor investigatif harus mengumpulkan dan menguji bukti untuk mendukung kesimpulan dan temuan audit investigatif.

4. Dokumentasi

Auditor harus menyiapkan dan menatausahakan dokumen audit investigatif dalam bentuk kertas kerja audit. Dokumen audit investigatif harus disimpan secara tertib dan sistematis agar dapat secara efektif diambil kembali, dirujuk, dan dianalisis.

Setelah auditor melaksanakan audit invesigatif, selanjutnya auditor berkewajiban

untuk membuat laoran. Laporan audit investigatif dibuat secara tertulis dengan tujuan untuk memudahkan pembuktian dan berguna untuk proses hukum berikutnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam Putusan Nomor 64/Pid.Sus-Tpk/2015/PN.Pbr, laporan audit infesvestigatif termuat dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Perbaikan Docking KT. Bayu II Pada PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Nomor : SR-356/D6/02/2015 tanggal 25 Mei 2015. dan Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg, laporan audit investigatif termuat dalam Laporan Hasil Audit Investigatif BPKP Perwakilan Jawa Tengah atas dugaan Penyimpangan Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Sekretariat DPRD Kabupaten Grobongan Tahun 2006, 2007 dan 2008 Nomor: LHAI/PWII/5/2009 tanggal 29 Desember 2009.

Laporan hasil audit tersebut selain membantu pada tingkat penyidikan juga dipergunakan di dalam persidangan yang termuat dalam surat dakwaan, dan auditor juga diperdengarkan keterangannya sebagai saksi ahli berkaitan dengan Laporan hasil audit yang dibuatnya. Laporan hasil audit dan keterangan ahli dipersesuaikan dengan keterangan-keterangan saksi dan alat bukti lainnya, sehingga hakim menilai dan menentukan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berapa jumlah kerugian keuangan negara akibat dari kasus tindak pidana korupsi.

Dalam Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg penilaian hakim dalam menentukan jumlah kerugian keuangan negara sama dengan hasil audit yang dilakukan oleh ahli, dalam hal ini ahli dari BPKP Perwakilan Jawa Tengah, jumlah kerugian kerugian negara yang terjadi akibat dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa adalah Rp. 661.171.574 jumlah tersebut sesuai dengan Laporan Hasil Audit Investigatif BPKP Perwakilan Jawa Tengah atas dugaan Penyimpangan Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Sekretariat DPRD Kabupaten Grobongan Tahun 2006, 2007 dan 2008 Nomor: LHAI/PWII/5/2009 tanggal 29 Desember 2009 dan putusan hakim

mengenai pidana tambahan berupa membayar uang pengganti kepada negara.

Sedangkan dalam Putusan Nomor 64/Pid.Sus-Tpk/2015/PN.Pbr penilaian hakim dalam menentukan jumlah kerugian keuangan negara tidak sama dengan hasil audit yang dilakukan oleh ahli. Ahli yang dihadirkan di persidangan berpendapat bahwa kerugian keuangan negara sebesar Rp.1.712.156.000 (satu milyar tujuh ratus dua belas juta seratus lima puluh enam ribu rupiah) sedangkan dalam pertimbangan hukum hakim menyatakan bahwa kerugian keuangan negara yang tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa sebagai Kepala UGK adalah sebesar Rp. 375.086.000,- (tigaratus tujuh puluh lima juta delapan puluh enam ribu rupiah). Perbedaan atas penilaian jumlah kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh hakim tidak dilarang, dikarenakan tidak ada satupun peraturan yang mewajibkan hakim untuk mengikuti hasil audit yang dilakukan oleh ahli, walaupun audit tersebut dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibelitas, efektifitas, dan efisien, dan hakim pun wajib menjaga kemandirian peradilan yang artinya bebas dari campur tangan pihak luar dan bebas dari segala bentuk tekanan, baik fisik maupun psikis, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Hakim tidak diharuskan mengikuti penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan ahli, hal ini akan berdampak kepada hasil penghitungan kerugian keuangan negara, sehingga menimbulkan perbedaan penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh hakim dan ahli. Perbedaan tersebut mengakibatkan ketidakpastian dalam peradilan tindak pidana korupsi, ketidakpastian dalam menghitung kerugian keuangan negara akan merugikan negara, dikarenakan pengembalian kerugian keuangan negara tidak dapat dilakukan secara maksimal. Sebaliknya apabila penghitungan kerugian keuangan negara jumlahnya pasti maka hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Menurut pandangan saya jumlah kerugian keuangan negara merupakan batas atas untuk menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti, apabila kerugian keuangan negara pasti jumlahnya maka terdakwa dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti secara maksimal, sehingga negara yang semula merugi dapat mengembalikan kerugian tersebut dengan penjatuhan pidana tambahan.

B. Dasar Pertimbangan Dalam Menentukan Unsur Kerugian Keuangan Negara Pada Kasus Tindak Pidana Korupsi

Dasar pertimbangan dalam menentukan kerugian keuangan negara pada Putusan Nomor 64/Pid.Sus-Tpk/2015/PN.Pbr yang dilakukan oleh ahli dapat dilihat dalam Laporan Hasil Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Perbaikan Docking KT. Bayu II Pada PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Nomor : SR-356/D6/02/2015 tanggal 25 Mei 2015, dengan perincian antara lain sebagai berikut :

1)	Realisasi pembayaran oleh PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) kepada UGK PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) atas pekerjaan General Overhaul Mesin Induk Kanan KT. Bayu II (sesuai dengan bukti transfer)	Rp. 1.712.156.000,-
2)	Nilai Prestasi Atas Pekerjaan Pemasangan Mesin Induk Kanan KT Bayu II yang oleh UGK disubkontraktorkan kepada PT. Citrapola Niaga Nusantara (PT.CNN)	0
	Jumlah kerugian keuangan negara	Rp. 1.712.156.000,-

Poin 1) dikurangi poin 2)	
---------------------------	--

Keterangan ahli dalam persidangan menyatakan bahwa hasil penghitungan kami berdasarkan total *loss* dari uang muka yang diberikan tidak ada penyelesaian kapal tidak bisa berjalan kerugian keuangan negara Rp. 1.712.156.000. Bahwa dari hasil pekerjaan itu tidak ada manfaatnya, dimana kepentingan umum tidak terlayani dengan diputusnya kontrak kapal belum selesai realisasi kapal tidak bisa berjalan. Bahwa didalam kontrak dari kapal itu rusak sampai dilakukannya *site trail* (difungsikan berlayar uji coba) namun sampai kontrak itu diputuskan kapal tidak dapat difungsikan.

Dasar pertimbangan dalam menentukan kerugian negara pada Putusan Nomor 64/Pid.Sus-Tpk/2015/PN.Pbr yang dilakukan oleh hakim dengan cara mengurangi hasil kerugian keuangan negara sebagaimana pendapat ahli yaitu sebesar Rp.1.712.156.000 (total *loss*) dengan pembayaran yang telah dilakukan kepada PT. CNN, ITS, pembayaran Pajak. Hal ini dapat dilihat dalam salah satu pertimbangan hukum hakim yang menyatakan. Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta yuridis bahwa kerugian akibat dari perbuatan tersebut, telah mengakibatkan kerugian Keuangan Negara Cq Keuangan PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) sebesar Rp. 1.712.156.000 dikurangi dengan yang telah dibayarkan oleh UGK selanjutnya uang yang dicairkan tersebut digunakan untuk melakukan pembayaran kepada Captain YUDI Handoko (Direktur PT. CNN) sebesar Rp. 1.300.450.000 sisa nya Rp. 411.706.000 yang masih berada pada bendahara pengeluaran UGK dipotong dengan pembayaran ITS sejumlah Rp. 14.000.000, pelunasan ITS Rp. 14.620.000, pajak KT Bayu II Rp.12.000.000, jadi sisa Rp. 411.706.000 – Rp. 36.620.000 = Rp. 375.086.000 (Tiga Ratus tujuh puluh lima juta delapan puluh enam ribu rupiah) yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara kelembagaan oleh Terdakwa sebagai Kepala UGK.²⁶

Dalam Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg perbedaan penghitungan kerugian keuangan negara terdapat pada pertimbangan hakim dengan pertimbangan hakim pada bagian lain. Dalam pertimbangan hukum hakim ada perbedaan penghitungan kerugian keuangan negara yang terjadi akibat dipergunakan untuk kepentingan pribadi. Dalam pertimbangan hukum hakim disebutkan sebagai berikut : Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dari kerugian negara yang terjadi akibat dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2008 adalah sebesar Rp.611.171.574.²⁷ Pertimbangan hukum hakim yang menyebutkan bahwa kerugian keuangan negara yang terjadi akibat dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa sebesar Rp.611.171.574 tentunya mengikuti dari Laporan Audit Investigatif BPKP Perwakilan Jawa Tengah Nomor: LHAI-PWII/5/2009 tanggal 29 Desember 2009, yang menyebutkan, Bahwa dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan terdakwa bersama-sama dengan Agus Suprianto, SH. bin Suyahmo, H. Soenarto, SH. MM. bin Setamun dan Drs. Sutanto, MM. bin Sumrto tersebut telah memperkaya diri terdakwa sendiri yaitu mendapatkan uang sebesar Rp.611.171.574,- (enam ratus sebelas juta seratus tujuh puluh satu lima ratus tujuh puluh empat rupiah). Dengan perincian sebagai berikut :

- Tahun 2006 sebesar Rp. 213.769.808,-;
- Tahun 2007 sebesar Rp. 289.415.850,-;
- Tahun 2008 sebesar Rp. 107.985.916,-;

sedangkan pertimbangan hukum hakim pada bagian lain yang menyebutkan : Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara bertahap dan dalam waktu antara kurun waktu tahun 2006 sampai dengan 2008 sehingga jumlah pengeluaran untuk kepentingan pribadi terdakwa tahun 2006 sampai 2008 sebesar Rp.

²⁶ Putusan Nomor : 64/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pbr. hlm. 131.

²⁷ Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg, hlm. 155.

270.870.117 (dua ratus tujuh puluh juta delapan ratus tujuh puluh ribu seratus tujuh belas rupiah), dengan suatu niat atau maksud yang sama yaitu untuk menguntungkan diri Terdakwa Sendiri.²⁸

Walaupun ada perbedaan penghitungan kerugian keuangan negara dalam pertimbangan hukum hakim yang satu dengan pertimbangan hukum hakim yang lain, hakim memutuskan bahwa kerugian keuangan negara sebesar Rp. Rp.611.171.574 ini tampak pada putusan hakim yang berkaitan dengan pidana tambahan berupa membayar uang pengganti kepada negara sebesar Rp. 187.353.574, angka ini didapatkan kerana terdakwa telah mengembalikan uang yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa sebesar Rp. 423.808.000. maka angka Rp. 187.353.574 diperoleh dari kerugian negara yang terjadi akibat dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2008 adalah sebesar Rp.611.171.574. Sebagaimana Audit Investigatif BPKP dikurangi dengan uang yang telah dikembalikan ke kas Daerah Grobongan yaitu sebesar Rp. 423.808.000 sehingga hasilnya Rp. 187.353.574 (seratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah).

Sumber kerugian keuangan negara mengacu kepada pohon kerugian keuangan negara (*fraud tree*) yang diperkenalkan *The Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) di Amerika Serikat dalam tulisan Theodorus M. Tuanakotta mengenai menghitung kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi.²⁹

Menurut Theodorus M.Tuanakotta, sebagaimana dikutip oleh Mahrus Ali, metode yang dipergunakan dalam penghitungan kerugian keuangan negara tergambar dalam tabel di bawah ini :³⁰

No	Sumber Kerugian Keuangan Negara	Metode Penghitungan Kerugian
1	<i>Receipt</i> (Penerimaan) ➤ Wajib bayar tidak setor ➤ Wajib pungut tidak setor ➤ Potongan penerimaan ditingkatkan	➤ Pokok dan bunga ➤ Pokok dan bunga ➤ Pokok dan bunga
2	<i>Expenditure</i> (pengeluaran) ➤ Kegiatan fiktif ➤ Perundangan tidak berlaku lagi ➤ Pengeluaran lebih cepat	➤ Pokok dan bunga ➤ Pokok dan bunga ➤ Bunga
3	Asset (aset) Pengadaan barang dan jasa Pelepasan asset Pemanfaatan asset Penempatan asset Kredit macet	➤ Kerugian total dengan penyesuaian ➤ Kerugian bersih ➤ Harga realisasi dikurangi dengan harga wajar ➤ Bunga untuk kerugian waktu ➤ Harga realisasi dikurangi dengan harga wajar ➤ <i>Opportunity cost</i> ➤ Kerugian total ➤ Bunga untuk kerugian waktu ➤ <i>Opportunity cost</i> ➤ Kerugian total ➤ Bunga untuk kerugian waktu ➤ Pokok dan bunga ➤ Pokok dan bunga
4	<i>Liability</i> (kewajiban)	➤ Pokok dan

²⁸ Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg, hlm. 170.

²⁹ Mahrus Ali, *Hukum Pidana Korupsi*, UII Pres, Yogyakarta, 2016, hlm. 258.

³⁰ *Ibid*, hlm. 263-264.

Kewajiban nyata	bunga
Kewajiban bersyarat	➤ Pokok dan bunga
Kewajiban tersembunyi	➤ Pokok dan bunga

Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg, sumber kerugian keuangan negara berasal dari kegiatan fiktif, terdakwa menggunakan anggaran pemeliharaan kendaraan dinas Sekretariat DPRD Kabupaten Grobongan, salah satunya anggaran tersebut digunakan untuk penggantian suku cadang mobil pribadi yang semestinya digunakan untuk kendaraan dinas di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Grobongan. Secara teoritis sebagaimana tabel di atas bila sumber kerugian keuangan negara berasal dari kegiatan fiktif maka metode yang digunakan berupa biaya pokok dan bunga. Akan tetapi dalam putusan ini metode penghitungan kerugian keuangan negara berdasarkan putusan hakim hanya menggunakan penghitungan kerugian pokok, walaupun metode penghitungan kerugian keuangan negara berupa biaya pokok tanpa bunga, tetapi penentuan jumlah kerugian keuangan negara dilakukan oleh hakim berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Cara pembuktian terhadap unsur kerugian keuangan negara pada kasus tindak pidana korupsi sudah dimulai dari tingkat penyidikan, dimana penyidik meminta bantuan ahli dalam menentukan jumlah kerugian keuangan negara, selanjutnya ahli sebagai auditor melakukan audit investigatif yang dilakukan secara independen dan objektif yang menghasilkan laporan hasil audit investigatif. Laporan hasil audit tersebut digunakan dalam persidangan yang terdapat dalam surat dakwaan. Walaupun audit tersebut dilakukan secara independen dan objektif hakim tidak harus mengikuti atau sependapat dengan ahli. Hakim menentukan jumlah kerugian keuangan negara berdasarkan dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, ini sesuai

dengan tugas hakim yang wajib menjaga kemandirian peradilan artinya hakim bebas dari campur tangan pihak luar sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Keusaan Kehakiman.

2. Dasar pertimbangan dalam menentukan unsur kerugian keuangan negara pada kasus tindak pidana korupsi apabila dilakukan oleh ahli berdasarkan audit investigatif sedangkan dalam pertimbangan hakim berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan. Perbedaan penghitungan kerugian keuangan negara dikarenakan metode penghitungan kerugian keuangan negara yang diterapkan berbeda, walaupun sumber kerugian keuangannya sama. Perbedaan penghitungan kerugian keuangan tersebut tetap diputuskan jumlahnya oleh hakim berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan yang didapatkan dari keterangan saksi, keterangan ahli maupun alat bukti yang sah lainnya.

B. Saran

1. Pembuktian kerugian keuangan negara pada kasus tindak pidana korupsi masih terdapat perbedaan penghitungannya, sehingga mengakibatkan ketidakpastian, walaupun hakim yang menentukan jumlah kerugian keuangan negara, akan tetapi hakim harus mempertimbangkan secara cermat hasil audit yang dilakukan oleh ahli, dikarenakan audit tersebut dilakukan secara independen, objektif dan profesional.
2. Ketidakpastian dalam menentukan jumlah kerugian keuangan negara berdampak kepada Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengenai pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti. Menurut pandangan saya harus ada kepastian jumlah kerugian keuangan negara, karena jumlah tersebut merupakan batas atas dalam hal menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti. Negara yang semulanya merugi dikarenakan tindak pidana korupsi dapat mengembalikan kerugian tersebut dengan pidana tambahan berupa uang pengganti.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adam, Aswarni dan Zulkifli, 2006, *Prinsip-Prinsip Dasar Sistem Hukum Indonesia*, Pekanbaru, Alaf Riau.
- Ali, Mahrus, 2016, *Hukum Pidana Korupsi*, Yogyakarta, UII Pres.
- Aslim, Rasyad, 2005, *Metode Ilmiah, Persiapan Bagi Peneliti*, Pekanbaru, UNRI Press.
- Effendi, Erdianto, 2012, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, PT. Refika Aditama.
- _____, 2001, *Pengetahuan Dasar dan Teknis Dalam Penelitian Hukum*, Palembang, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- Hiariej, Eddy O.S, 2012, *Teory dan Hukum Pembuktian*, Yogyakarta, PT Gelora Aksara Pratama.
- Huda, Chairul, 2008, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta, Kencana.
- Kanter, E. Y. & S. R. Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta, Stora Grafika.
- Raharjo, Satjipto, 1983, *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung, Sinar Baru.
- Rosikah, Chatriana Darul dan Dessy Marliani Listianingsih, 2016, *Pendidikan Anti Korupsi*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Saputra, Dwi dkk, 2004, *Tiada Ruang Tanpa Korupsi*, Semarang, KP2KKN Jawa Tengah.
- Soedirjo, 1985, *Jaksa dan Hakim dalam Proses Pidana*, Jakarta, CV Akademika Pressindo.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, PT.Raja Grafindo Perseda.
- Toegarisman, M. Adi, 2016, *Pemberantasan korupsi Dalam Paradigma Efisiensi*, Jakarta, Kompas Media Nusantara.
- Wiyono,R, 2012, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Rinar Grafika.

B. Jurnal/Kamus

- Wahyu Wiriadinata, 2012, "Korupsi dan Pembalikan Beban Pembuktian", *Jurnal Konstitusi*, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Vol. 9, No. 2 Juni
- Daperemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai pustaka, Edisi Ketiga, cetakan keempat, Jakarta..

C. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2958.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654.

D. Website

- <http://www.e-jurnal.com/2014/01/pertanggungjawaban-pejabat-administrasi.html>, diakses, tanggal, 13 Maret 2017.